

SOSIAL POLITIK DALAM TAFSIR HAMKA

Abdul Wahid

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
abdulwahidbinarsyad@gmail.com*

ABSTRACT

This paper is motivated by the development of the interpretation of the Koran in Indonesia, in particular the study of works of Tafsir Al-Azhar Hamka, who received great attention from various researchers. In addition, the development of thought in the field of interpretation is one thing that is very important, because the Qur'an is the source of the research that was never completed. Core issues discussed in this thesis is twofold: How to influence social conditions in the interpretation of the Koran that do Hamka in his commentary ?, and how to influence the political aspects of the Qur'anic exegesis by Hamka? To find answers to these problems above, then do literature study (library research), with review of books relating to the issues discussed. From a review of this literature, acquired the desired data and then analyzed in depth by using descriptive analysis method, which is to analyze and describe the findings obtained. From the results of the various sources related to the issues of this thesis, it was found that the first Hamka in interpreting paragraph 59 letter al-Nisa 'influenced by the social situation that is happening. This can be seen in the content of the interpretation of these verses associated with the destruction of the Islamic society under Islamic rule of the Ottoman Empire. Whereas if it is linked to social conditions locally, it can be concluded that the interpretation of verse 59 of Surat al-Nisa 'is Hamka not affected by social situations that are local (Indonesian context). Both the interpretation of paragraph 58 letter al-Nisa ', Hamka was not influenced by the political situation is growing. This can be seen in the content of the interpretation of the verse, where Hamka understanding of the verse does not connect with the political situation in Indonesia and the global Islamic politics, when books authored on this interpretation. Furthermore, it can be explained that Hamka was a prominent flexible, so he tried to adapt to current conditions. In conclusion interpretation, Hamka said that all leaders must maintain trust and provide a mandate to the person who has the right, not to the family, according to the author, not the things that belong to the influence of the political situation that was developing, the interpretation in the interpretation of it.

KEYWORDS

tafsir al-azhar;social; politik

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diyakini oleh ummat Islam sebagai sumber hukum dan pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai sebuah mu'jizat penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah habis, bahkan semakin berkembang seiring berkembangnya peradaban dan berjalannya masa. Dengan kata lain pancaran sinar sebagai interpretasi manusia terhadap kitab suci ini akan terus muncul dari sumber yang sama yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu bermunculannya tafsir-tafsir al-Qur'an harus dianggap suatu dinamika dan cerminan perkembangan wawasan para penafsirnya sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak bisa dipisahkan oleh masa munculnya tafsir tersebut.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, mempunyai sejarah panjang perkembangan khazanah tafsir dari waktu ke waktu. Pada awalnya tafsir-tafsir di nusantara, timbul dalam bahasa Jawa dan Sunda. Hal ini sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat ketika itu, yang belum mempunyai bahasa Nasional seperti sekarang. (Ervan Nurtawab: 2004, 5.) Di samping itu di antara tafsir-tafsir nusantara tersebut juga telah mengambil rujukan dari tafsir-tafsir berbahasa Arab seperti *Tafsir Baydhwawi* dan *Tafsir Jalalayn*.

Pada masa setelah kemerdekaan, dan telah diikrarkan bahasa Melayu sebagai persatuan dengan sebutan Bahasa Indonesia, para penafsir nusantara mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam berbagai karya tulis dan tidak terkecuali dalam mengarang tafsir. Di antara sekian banyak tafsir yang menggunakan bahasa Indonesia, maka tafsir al-Azhar dianggap sebagai tafsir yang mempunyai dimensi yang unik dibandingkan tafsir-tafsir lainnya. Keunikan ini dapat dipahami karena pengarangnya mempunyai latar belakang keilmuan dalam berbagai bidang. Berbeda dengan tafsir-tafsir Indonesia yang lain, biasanya cenderung kepada bidang-bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pengarangnya. Dengan kata lain, Tafsir al-Azhar ini menampakkan corak multi dimensi seperti sastra, sejarah, politik, bahasa, dakwah dan sebagainya.

Perkembangan Tafsir Indonesia sejak awal abad ke 20 hingga tahun 1960- an memberikan tiga corak penafsiran yaitu: a. Penafsiran surat-surat tertentu; b. Penafsiran terhadap juz-juz tertentu dan c. Penafsiran secara keseluruhan al-Qur'an. Contoh corak pertama antara lain: *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Yaasin*, Karya Adnan Lubis yang diterbitkan di Medan pada tahun 1951. Tafsir ini hanya menafsirkan satu surat yaitu surat Yasin. Contoh corak kedua adalah: *Al-Burhan, Tafsir Juz Amma*, karya H. Abdul Karim Amrullah, diterbitkan tahun 1922 di Padang. Sedangkan Tafsir Hamka menjadi salah satu model tafsir ketiga, yaitu lengkap 30 juz, di samping tafsir-tafsir yang lain. Tafsir ini diterbitkan pertama kali tahun 1967 di Jakarta. (Islah Gusmian: 2003, 67)

SEKILAS BIOGRAFI HAMKA DAN KARYANYA

Nama Hamka merupakan singkatan dari H. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Ia dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 13 Muharram 1326 H. atau 16 Februari 1908. (Hamka, 1979, 9). Ia adalah anak seorang ulama yang bernama H. Abdul Karim Amrullah, yang pada masa kecilnya dipanggil dengan nama Muhammad Rasul. Abdul Karim Amrullah merupakan salah seorang dari pelopor gerakan modern Islam di Indonesia. (Deliar Noer, 1981: 124).

Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah. Isterinya bernama Siti Roham binti Endah Sultan. (Hamka: 1982, 2) Keilmuan dan ketokohan ayahnya merupakan penerus kakeknya yang juga merupakan ulama terkemuka, dan pada akhirnya diteruskan oleh Hamka. Keilmuan yang dimiliki dan digeluti Hamka seakan memberikan kesempurnaan dari keilmuan kakek dan ayahnya. Hal demikian dapat dilihat dari cakupan keilmuan Hamka yang meliputi hampir seluruh bidang ilmu sehingga sosok Hamka menjadi tokoh multi dimensi. Di antara status keilmuan yang melekat pada diri Hamka antara lain adalah: sastrawan, budayawan, muballigh, akademisi, mufassir, sejarawan bahkan menjadi seorang politikus. Status tersebut kelak memberikan warna tersendiri dalam karya Tafsirnya yang terkenal dengan Tafsir al-Azhar. Ia wafat pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun.

Pada tahun 1908 dalam sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia, masih dalam genggaman penjajah. Sedangkan pada tahun 1981 saat Hamka meninggal Indonesia dalam pemerintahan Orde Baru. Di antara tahun 1908 sampai 1981, tentu saja terjadinya banyak peristiwa baik secara nasional maupun secara regional. Paling kurang dapat dikatakan bahwa Hamka melewati beberapa fase pemerintahan Indonesia, yang dimulai dari masa kolonial, kemerdekaan, pemberontakan PKI dan terakhir pada kekuasaan Orde Baru. Pada tahun kelahiran Hamka, di Padang sedang berlangsung pertikaian antar sesama masyarakat di sana. Pertentangan yang terjadi adalah perseteruan antara kaum muda dan kaum tua dalam masalah khilafiah. (Rusydi Hamka, 1981, 26).

Sebagai seorang ulama yang menguasai hampir semua disiplin ilmu keislaman, ia sangat produktif dalam melahirkan berbagai karya ilmiah. Menurut James Rush, tulisan Hamka mencapai jumlah 115 judul dalam berbagai disiplin ilmu. Karya yang paling utama atau karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Azhar*. Secara umum karya-karyanya dapat dilihat antara lain: *Bohong di Dunia: Penilaian Agama Yahudi, Kristen dan Islam; Perkembangan Kebatinan di Indonesia; Dari Lembah Cita-Cita; Studi Islam; Pelajaran Agama Islam; Syarah Kitab Tauhid; Lembaga Budi; Akhlakul Karimah; Lembaga Hidup; Islam dan Adat; 1001 Tanya Jawab tentang Islam; Membahas Soal-soal Islam; Kedudukan Wanita dalam Islam; Do'a-Do'a Rasulullah; Tuntunan Shalat Tarawih; Tuntunan Shalat Tahajjud; Falsafah Ideologi Islam; Mutiara Filsafat; Filsafat Ketuhanan; Falsafah Hidup; Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad; Tasawuf Modern; Renungan Tasawuf; Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya; Lembaga Hikmah; Tafsir al-Azhar; Pengantar Ilmu Tafsir;*

Pedoman Muballigh Islam; Revolusi Agama; dan lain-lain. (M. Atho' Muzdhar: 1993, 64)

MASYARAKAT Islam DAN PERANANNYA DI MASA ORDE LAMA

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Walaupun dasar negara yang dianut Indonesia bukan agama (Islam), namun Indonesia juga disebut sebagai negara Islam. Hal ini terutamanya disebabkan jumlah penduduk muslim Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan kata lain, mengkaji Indonesia adalah mengkaji umat Islam di Indonesia. Jumlah umat Islam yang besar tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari luasnya negara Indonesia serta jumlah penduduk yang menduduki empat besar di dunia. Keunikan yang dimiliki Indonesia adalah masyarakatnya terdiri dari banyak suku bangsa. Pola kehidupan dalam suatu suku bangsa tidak dapat pula dipisahkan dengan kemajemukan yang juga memberi nuansa tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Seperti telah disinggung di atas bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Tetapi ini tidak berarti bahwa umat Islam merupakan umat yang koheren. Karena daerah-daerah di Indonesia mempunyai sejarah sendiri-sendiri, diwarnai oleh pengaruh yang berbeda, keadaan aliran-aliran dalam Islam yang kini ada berbeda juga. Meskipun sebuah proses Pan Islamisasi sudah mulai sejak beberapa abad yang lalu, Indonesia tidak kehilangan keragaman dalam varietas Islam.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, umat Islam telah mengalami banyak fase perkembangan dan peranannya dalam negara. Hal ini bukan saja disebabkan faktor mayoritas masyarakat beragama Islam, tetapi juga karena Islam dikenal bukan sekedar agama, tetapi juga merupakan kebudayaan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Sidi Gazalba: "Islam bukan hanya agama, tetapi juga kebudayaan. Sebagai tata kebudayaan ia membentuk masyarakat, pemerintah, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga sendiri, terutama pembentukan negara dengan rakyat dan wilayahnya. Kalau ia hanya tata agama, ia tidak akan membentuk negara. Asas agama diturunkan di Makkah, asas masyarakat dan negara di Madinah. Dalam masyarakat dan negara yang berpusat di Damsyik tumbuh benih kebudayaan universal. Benih itu mengalami perkembangan ketika Baghdad menggantikan Damsyik. (Sidi Gazalba: 1976, 278).

Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah memainkan peran yang penting bagi perkembangan Islam dunia. Peran penting tersebut antara lain tumbuhnya lembaga-lembaga keagamaan yang dapat menjadikan kehidupan masyarakat lebih terarah dan lebih berperadaban. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut juga menjadi media tersendiri bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebaliknya pemerintahpun menjadikan lembaga kemasyarakatan sebagai perwakilan umat Islam dalam berbagai agenda pemerintah yang ingin dimintai aspirasi masyarakat.

Dalam ranah politik pun umat Islam di masa Orde Lama memiliki peran tersendiri. Hal demikian ditandai oleh berdirinya partai-partai politik berasaskan Islam, seperti Masyumi yang dideklarasikan pada November 1945. (Bahtiar Effendy: 1998, 92). Partai Masyumi bukan sekedar partai pertama yang didirikan di Indonesia, tetapi juga ia merupakan partai yang memiliki dukungan mayoritas masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkembangan politik yang islami ini tidaklah berlanjut hingga masa-masa berikutnya, baik masa Orde Baru, hingga sekarang. Ketertinggalan politik umat Islam ini sebenarnya bukan dikalahkan oleh umat-umat beragama lain di Indonesia, tetapi lebih pada perlawanan dengan partai-partai yang tidak menamakan dirinya partai agama (Islam). Dengan kata lain, partai Islam bersaing dengan partai nasional. Partai nasional secara umum juga di dalamnya adalah mayoritas umat Islam. Hanya saja, Partai Islam menjadikan Islam sebagai dasar partainya, sedangkan partai nasionalis menjadikan Pancasila sebagai dasar partai mereka.

Dibandingkan dengan kondisi partai Islam di era reformasi sekarang ini, maka posisi umat Islam pasca revolusi memiliki posisi yang sangat strategis. Pada Agustus 1950, partai-partai politik di Indonesia telah mengalami penyegaran kembali dan “pulih dari kelesuan pada 1949”. Dalam parlemen yang baru dibentuk dengan jumlah keseluruhan anggota 236 orang, Masyumi tampil sebagai partai terbesar dengan menduduki 49 kursi. Namun demikian, karena banyaknya partai, organisasi dan asosiasi yang diwakili dalam parlemen (tidak kurang dari 22), bersama PSII, kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23 %). Kedua, dalam beberapa kesempatan, Masyumi diminta untuk membentuk dan memimpin kabinet. Dari tujuh yang berjalan di bawah sistem demokrasi konstitusional (1950-1956), tiga kabinet dipercayakan kepemimpinannya kepada Masyumi. (Bahtiar Effendy, 94)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran umat Islam di era Orde Lama dari sisi politik, dalam periode tertentu memiliki kapasitas yang sangat baik. Walaupun demikian, hambatan dan tantangan terberat bagi umat Islam di masa Orde Lama ini adalah terjadi persekongkolan politik antara komunisme dengan penguasa yang secara jelas sangat bertentangan dengan Islam baik aqidah maupun syari'ah. Untuk itu para pemimpin Islam termasuk Hamka memiliki keprihatinan yang sangat mendalam, sehingga Hamka menyebutnya dengan istilah “Islam dalam bahaya” ketika itu.

IMPLIKASI KONDISI SOSIAL DALAM TAFSIR AL-AZHAR HAMKA

Penafsiran terhadap al-Quran tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi dan situasi, kapan dan di mana serta siapa penafsir tersebut. Seorang sastrawan akan dipengaruhi oleh kesastraan yang dimiliki dan digelutinya. Seperti itu juga halnya seorang ahli fiqh, akan dipengaruhi oleh nuansa fiqh dalam penafsiran yang ia lakukan.

Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis terhadap hasil penafsiran ayat al-Quran dengan kondisi sosial dan politik, baik bahasa yang digunakan maupun hasil penafsiran serta adanya ungkapan-ungkapan penafsir itu sendiri terhadap kondisi

sosial politik yang sedang berlangsung. Sebagaimana telah disinggung dalam bab pendahuluan bahwa ayat yang akan dikaji dalam karya ini adalah pada Surat *al-Nisa'* ayat 59 sebagai ayat kemasyarakatan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِنُكْحِ
تُمْتُوا بِمَنْ نَزَّلَ اللَّهُ الْكِتَابَ الْيَوْمَ مَالًا خَيْرٌ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".

Pokok bahasan tentang ayat di atas antara lain tentang kewajiban taat kepada Allah, Rasul serta pemimpin. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan juga bahwa ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek sosial, karena perintah Allah untuk ditaati oleh masyarakat adalah Allah, Rasul dan Ulil Amri. Dalam kajian ini akan dilakukan penelusuran penafsiran yang dilakukan Hamka terhadap ayat ini, kemudian menganalisis bagaimana keterkaitan dengan kondisi yang sedang terjadi pada masa tersebut. Untuk memperoleh hasil pemahaman yang lebih dalam, juga akan dibandingkan dengan beberapa tafsir yang terkemuka dan *mu'tabar*.

Dalam suatu kajian komparatifnya, Zulkarnaini Abdullah memaparkan bahwa Tafsir al-Azhar ada spontanitas yang terjadi dalam penafsiran Hamka. Hal ini dikarenakan bahwa Hamka dalam satu sisi adalah seorang sastrawan, yang memang responsif dengan persoalan umat yang sedang bergulir. Spontanitas tersebut secara positif memiliki peran untuk mencoba mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. (Zulkarnaini Abdullah: 2011, 69).

Asbab al-nuzul ayat

Bukhari dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, "Diturunkan ayat ini pada Abdullah bin Hudzafah bin Qais, yakni ketika ia dikirim oleh Nabi saw. dalam suatu ekspedisi. Berita itu diceritakannya secara ringkas. Ini berarti mengada-ada terhadap Ibnu Abbas, karena disebutkan bahwa Abdullah bin Hudzafah tampil di hadapan tentaranya dalam keadaan marah, maka dinyalakannya api lalu disuruhnya mereka menceburkan diri ke dalam api itu. Sebagian mereka menolak, sedangkan sebagian lagi bermaksud hendak menceburkan dirinya. " Sekiranya ayat itu turun sebelum peristiwa, maka kenapa kepatuhan itu hanya khusus terhadap Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain-lainnya? Dan jika itu turun sesudahnya, maka yang dapat diucapkan pada mereka ialah, "Ta'at itu hanyalah pada barang yang makruf," jadi tidak pantas dikatakan, 'Kenapa kalian tidak mau mematuhiya?'" Dalam pada itu Hafizh Ibn Hajar menjawab bahwa yang dimaksud di dalam kisahnya dengan, "Jika kamu berselisih pendapat dalam sesuatu hal," bahwa mereka memang berselisih dalam menghadapi perintah itu dengan kepatuhan, atau menolaknya karena takut pada api. Maka wajarlah bila waktu itu diturunkan pedoman yang dapat memberi petunjuk bagi mereka apa yang harus diperbuat ketika berselisih pendapat itu yaitu mengembalikannya

kepada Allah dan Rasul. Ibn Jarir mengetengahkan bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kisah yang terjadi di antara 'Ammar bin Yasir dengan Khalid ibn Walid yang ketika itu menjadi amir atau panglima tentara. Tanpa setahu Khalid, Ammar melindungi seorang laki-laki hingga kedua mereka pun bertengkar. (Imam Bukhari)

Berdasarkan *asbab al-nuzul*, memang ayat di atas jelas diturunkan untuk mengatur masyarakat agar taat kepada pemimpin. Adapun mengapa dalam ayat tersebut terlebih dahulu disebutkan perintah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baru kemudian disebut taat kepada *ulul amri*, kemungkinan memiliki makna bahwa taat kepada pemimpin tidak boleh melebihi dari pada taat kepada Allah dan Rasul, sehingga peristiwa perselisihan tentang wajib taat atau tidak pun, memiliki syarat tertentu, yaitu dalam kapasitas yang tidak mutlak. Dengan kata lain, tidak wajib taat jika perintah yang ditetapkannya bukan dalam hal memberikan keselamatan dan kemaslahatan. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa perintah yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak wajar, yaitu perintah menceburkan diri ke dalam api.

Penafsiran Hamka

Hamka memberi judul penafsiran Q. S. 4: 59 (ayat 59 surat *al-Nisa'*) dengan "Ketaatan kepada Penguasa". Dengan penabalan tema tersebut, dapat dipahami bahwa Hamka menekankan ketaatan kepada penguasa merupakan fokus sentral dari pada ayat 59 surat *al-Nisa'*. Hal ini mungkin Hamka mendasarinya dari *asbab al-nuzul* ayat, seperti telah dipaparkan di atas, yaitu berkaitan dengan wajib atau tidaknya seseorang taat kepada pemimpin, kendatipun terhadap hal-hal yang tidak dapat diterima atau perintah sesuatu yang malah mencelakakan pelaku itu sendiri.

Hamka sedikit menjelaskan tentang pengertian *ulil amri*, kemudian menceritakan sejarah singkat sejak dari Nabi hingga masa kekhalifahan. Hamka menutup uraian tentang pemimpin tersebut dengan mengatakan: Tetapi semua perkembangan ini tidaklah terlepas dari tinjauan ahli-ahli pikir Islam. Terutama ulama-ulama fiqh dan ahli-ahli Ushuluddin. Niscaya pendapat mereka pun dipengaruhi oleh keadaan atau suasana ketika mereka hidup. (Hamka, 132). Dengan kata lain, Hamka pun meyakini tidak ada penafsiran terhadap nash yang tidak dipengaruhi oleh faktor yang terdapat pada diri penafsir, yaitu latar belakang pendidikan serta pola pikir, di samping juga pengaruh lingkungan di mana serta kapan seorang penafsir itu hidup.

Dalam simpulannya, Hamka kembali mengulangi penafsiran melalui *asbab al-nuzul* ayat tersebut. Ayat tersebut memberikan isyarat taat kepada pemimpin ada batasnya, yaitu selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kesesatan, kehancuran dan hal-hal yang tidak logis untuk dilaksanakan. Namun demikian, Hamka pun menegaskan bahwa jiwa seorang pemimpin yang adil memberikan perintah kepada rakyatnya dalam hal-hal yang memang wajar dan sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka haram meninggalkan perintah tersebut. Hal ini juga tersirat dalam *sabab al-nuzul* bahwa para sahabat sangat teguh memegang perintah Allah dan Rasulullah agar mereka selalu taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, tidak mengherankan hampir saja para sahabat mengikuti perintah

pemimpin secara totalitas, padahal ada perbedaan antara perintah taat kepada Allah dan Rasul dengan perintah taat kepada pemimpin. Perintah taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, sedangkan taat kepada pemimpin tidak mutlak. (Hamka, Juz V,135)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penafsiran Hamka terhadap ayat yang berkenaan dengan perintah taat kepada pemimpin, sejauh analisis penulis dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan sosial masyarakat ketika itu, dalam konteks global, yaitu pengarang tersebut menjelaskan secara panjang lebar beberapa khalifah yang ada di dunia Islam.

Dalam konteks perkembangan sosial masyarakat Indonesia, sejauh pengamatan penulis tidak memberi pengaruh kepada penulis kitab Tafsir al-Azhar. Hal ini menurut penulis, dapat dikatakan demikian karena Hamka tidak menghubungkan penafsirannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia ketika itu, tetapi adanya pengaruh yang berhubungan dengan kondisi kekhalifahan umat Islam yang terakhir yaitu Turki Utsmani. Penafsiran yang demikian, menurut pemahaman ahli tafsir, sudah dianggap melenceng dari tafsir atau condong kepada adanya *dakhil*, yaitu dalam hal ini Hamka menafsirkan al-Quran dengan cara menghubungkan ayat yang ditafsirkan dengan sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di dunia Islam.

Lebih jauh, Hamka tidak menyinggung secara langsung bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi masyarakat Islam ketika itu, terutamanya dalam hal menaati pemimpin, Hamka tidak menjelaskan secara nyata, kepada siapa umat Islam Indonesia harus taat, setelah Allah dan Rasul. Hanya saja, di akhir penafsiran Hamka mengatakan bahwa yang disampaikan dalam penafsiran ayat 59 surat *al-Nisa'* tersebut adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi kemajuan pembangunan bangsa Indonesia ketika itu. Hamka menghubungkan dengan konteks global, dan tidak menghubungkan dengan konteks sosial keindonesiaan ketika itu, dapat saja sebagai upaya menjaga diri dari perlakuan yang tidak baik dari penguasa. Namun dapat juga dikatakan sebagai upaya Hamka menjaga kemurnian penafsirannya, sehingga tidak menjauh dari koridor tafsir.

Implikasi Politik dalam Tafsir

Dalam hal terdapat tidaknya pengaruh perkembangan dan dinamika politik terhadap hasil penafsiran dalam *Tafsir Al-Azhar* akan ditelusuri melalui ayat 58 dari surat al-Nisa'.

إِنَّا لَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّا لَنَنصِرُكَ بِاللَّهِ كَمَا نَصَرْنَا لَكُمْ بِهَا ۗ إِنَّا كَاتِبُونَ ۗ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Sebab turunnya ayat

Ibnu Murdawaih mengetengahkan dari jalur Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, katanya, "Tatkala Rasulullah Saw. membebaskan kota Mekah, dipanggilnya 'Uthman bin Talhah lalu setelah datang, maka beliau bersabda: "Coba lihat kunci Kakbah", lalu diambilkannya. Tatkala 'Uthman mengulurkan tangannya untuk menyerahkan kunci itu, tiba-tiba Abbas bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Demi ibu bapakku yang menjadi tebusanmu, gabungkanlah tugas ini dengan pelayanan minuman jama'ah. " Mendengar itu Uthman pun menahan tangannya, maka sabda Rasulullah Saw.: "Berikanlah kunci itu, hai 'Uthman. " Maka jawabnya, "Inilah amanat dari Allah. " Maka Rasulullah pun bangkit, lalu dibukanya Kakbah dan kemudian keluar, lalu bertawaf sekeliling Baitullah. Kemudian Jibril pun menurunkan wahyu agar mengembalikan kunci, maka dipanggilnya Uthman bin Thalhaf lalu diserahkan kunci itu kepadanya, kemudian dibacanya ayat, 'Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak.. ' hingga ayat itu selesai. " (Q. S.: 4: 58).

Syub'ah mengetengahkan dalam tafsirnya dari Hajjaj, dari Ibn Jurayj, katanya, "Ayat ini diturunkan mengenai Usman bin Thalhaf yang Rasulullah menerima kunci Kakbah dari padanya. Dengan kunci itu beliau memasuki Baitullah pada hari pembebasan, kemudian keluar seraya membaca ayat ini. Dipanggilnya Usman lalu diserahkan kunci itu kepadanya. " Katanya pula, "Kata Umar bin Khattab, 'Tatkala Rasulullah keluar dari Kakbah sambil membaca ayat ini, dan demi ibu bapak yang menjadi tebusannya, tidak pernah saya dengar ia membacanya sebelum itu. ' Kata saya, 'Jika dilihat dari sini, ternyata surah tersebut turun dalam ruangan Kakbah. '

Dari riwayat sebab turunnya ayat tersebut, maka konteks yang dijadikan pokok ayat tersebut adalah menjaga amanah dan menyampaikannya walaupun sebenarnya memungkinkan seseorang untuk tidak menyampaikan amanah dimaksud karena kita memiliki kekuasaan untuk itu.

Penafsiran Hamka

Penafsiran terhadap Q. S.: 4: 58 (ayat 58 Surat al-Nisa') dalam *Tafsir Al-Azhar*, oleh penafsirnya diberi judul atau tema: "Menyerahkan Amanat". Ayat ini memiliki *asbab al-nuzul*, (sehingga Hamka pun memulai penafsiran ayat ini dengan menjelaskan sebab-sebab turun ayat tersebut. Penabalan judul penafsiran, mungkin juga dipengaruhi oleh *asbab al-nuzul* ayat yang ditafsirkan, karena sisi *sabab al-nuzul* merupakan salah satu sumber penafsiran yang lebih tepat karena sesuai dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan, sesuai dengan peristiwa yang menyebabkan turun ayat tersebut.

Terhadap ayat ini, Hamka mengambil simpulan dalam bentuk harapan agar seluruh pelaksana pemerintahan, seluruh aparat pemerintah diberikan kepada orang yang bisa memegang amanat, orang yang ahli. Hak yang pertama ialah pada rakyat, atau dalam istilah agama, pada umat. Pilihan pertama ialah pucuk

pimpinan negara, atau sultan, atau khalifah atau presiden. Pengangkatan seorang pemimpin oleh masyarakat harus melalui *bai'at*. Masyarakat harus membuat perjanjian akan tetap memegang amanat. Setelah seseorang terpilih, diapun diberi kewajiban oleh Tuhan untuk menyerahkan atau menunaikan amanat kepada ahlinya pula, dengan tidak pandang pilih kasih, baik itu teman, anak atau keluarga. Setelah itu hendaklah orang tersebut menegakkan keadilan. Kalau menghukum di antara manusia hendaklah menghukum dengan adil. (Hamka, Juz. V, 138).

Di antara inti penafsiran Hamka tentang ayat tersebut adalah bahwa amanah harus dilaksanakan. Memang, ayat inilah yang wajib dipegang oleh penguasa, yaitu memberi amanah hendaklah kepada ahlinya. Orang yang akan diberi tanggung jawab dalam suatu tugas, hendaklah orang yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu. (Hamka, Juz. V, 120). Dalam menjelaskan tafsir ayat tersebut, Hamka tidak sedikitpun menghubungkan dengan kondisi politik yang sedang terjadi ketika tafsir itu sedang ditulis. Hal ini merupakan salah satu kelebihan tersendiri bagi Hamka karena dapat menahan diri dari kondisi politik yang ketika itu kurang kondusif. Sikap demikian, dapat dikatakan sikap fleksibel terhadap kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, Hamka tidak berkeinginan mengomentari kondisi yang kurang kondusif, karena mungkin Hamka sudah mempertimbangkannya dengan cukup matang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tulisan ini terdapat dua ayat yang diteliti, masing-masing ayat 59 dari surat al-Nisa' dan Surat yang sama ayat 58. Ayat 59 membicarakan tentang ketaatan kepada pemimpin. Secara jelas ayat tersebut memberikan perintah kepada orang yang beriman agar mentaati pemimpin. Kata yang digunakan oleh al-Quran dalam ayat tersebut untuk pemimpin adalah *uli al-amr*, kata ini memiliki makna yang beragam. Ada penafsir yang membatasi makna *uli al-amr* pada pemimpin dalam bidang agama saja, dan ada pula yang memberi makna yang sangat luas, yang meliputi pemimpin Negara, pemimpin daerah, wakil dari komunitas/masyarakat profesi bahkan pemimpin rumah tangga sekalipun.

Hamka menafsirkan ayat ini secara panjang lebar. Bahkan Hamka mengajak umat Islam untuk memperhatikan pengalaman kehancuran khilafah Turki Uthmani, sebagai khilafah Islam terakhir. Hamka menjelaskan sebab-sebab kehancuran khilafah tersebut secara panjang lebar. Penafsiran yang demikian, menurut penulis merupakan salah satu indikasi bahwa dalam melakukan penafsiran ayat tersebut, Hamka dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yaitu masyarakat di bawah kekhalifahan Islam terakhir, yang waktu itu baru berakhir kekuasaan kekhalifahan mereka. Dalam satu sisi, sikap Hamka menghubungkan tafsirnya dengan kondisi masyarakat muslim di bawah Turki Utsmani, adalah sebagai *i'tibar* bagi masyarakat di masa sekarang. Salah satu sebab kehancuran peradaban Islam di Turki, menurut Hamka karena mereka mengikuti peradaban luar Islam, serta tidak mencintai peradaban Islam.

Sehubungan dengan penafsiran ayat 58 dari surat al-Nisa', sejauh pengamatan penulis, Hamka tidak dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlaku, baik

secara global maupun lokal. Ayat ini menjelaskan tentang perintah menyerahkan amanah kepada ahlinya. Hamka tidak menyinggung bagaimana amanah-amanah yang diberikan rakyat Indonesia kepada para pemimpin mereka. Hamka juga tidak mengaitkan ayat tersebut dengan kondisi masyarakat Indonesia ketika itu dalam hal pengamalan ajaran agama, khususnya menjaga amanah. Hamka hanya memberikan penafsiran bahwa menyerahkan amanah kepada pemiliknya adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Dengan kata lain, penafsiran Hamka terhadap ayat tersebut, lebih fokus pada makna lafaz-lafaz yang terdapat di dalamnya, tanpa berlarut-larut kepada persoalan lain yang dapat diklaim sebagai sesuatu yang keluar dari tafsir Alquran.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap berbagai sumber terkait dengan permasalahan kajian ini, ditemukan bahwa *pertama* Hamka dalam menafsirkan ayat 59 surat *al-Nisa'* dipengaruhi oleh situasi sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada isi penafsiran ayat tersebut yang dihubungkan dengan kehancuran masyarakat Islam di bawah pemerintahan Islam Turki Uthmani. Sedangkan apabila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat yang bersifat lokal, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penafsiran ayat 59 Surat *al-Nisa'* tersebut Hamka tidak dipengaruhi oleh situasi sosial yang sifatnya lokal (konteks Indonesia).

Kedua dalam penafsiran ayat 58 surat *al-Nisa'*, Hamka tidak dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berkembang. Hal ini dapat dilihat pada isi penafsiran ayat tersebut, dimana Hamka menjelaskan dengan tidak menghubungkan dengan kondisi politik di Indonesia dan politik Islam global, ketika kitab tafsir tersebut dikarang. Lebih jauh, dapat dijelaskan bahwa Hamka adalah seorang tokoh yang fleksibel, sehingga Hamka berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi. Dalam simpulan penafsirannya, Hamka menyebutkan bahwa semua pemimpin harus menjaga amanah serta memberikan amanah kepada orang yang berhak, bukan kepada keluarga. Ungkapan yang terakhir tersebut, karena singkat dan tidak menyebutkan kondisi yang ada di sekelilingnya secara langsung, maka menurut penulis bukan hal yang tergolong adanya pengaruh kondisi politik yang sedang berkembang, terhadap penafsiran dalam tafsir itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hay al-Farmawi. (1977). *al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah,
- Abd. Al-Hayy al-Farmawi. (1994). *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, Jakarta: Rajawali Press.
- Abd. Muin Salim (ed.). (2005). *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras.
- Abuddin Nata. (2004). *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adnan Buyung Nasution. (1983). "Hamka, Figur yang Langka", dalam *Hamka di Mata Hati Ummat*, ed. Nasir Tamara, dkk, Jakarta: Sinar Harapan.

- Ahmad Warson Munawwir. (1984). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir,
- Akhyar Zain, *Hamka: Tafsir yang Bercirikan Sosio-Kultural*, Harian Waspada, 11 Februari 2011.
- Ali Audah. (1999). *Dari Khazanah Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Badruddin al-Zarkasyi. (1405 H). *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bahtiar Effendy. (1998)., *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Bukhari Abdul Shomad. (2011). *Khazanah Tafsir dan Hadits Nabawi; Sebuah Telaah Metodologis*, Banda Aceh: Pena.
- Chris Hilton (writer and director). (1991). *Shadowplay* Television documentary. Vagabond Films and Hilton Cordell Productions. ; Ricklefs
- Deliar Noer. (1981). *Gerakan Modern di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES,
- Ervan Nurtawab. (2004). "Karakteristik Tafsir Klasik Nusantara", *Harian Republika* Edisi Jum'at 17 September, hal. 5.
- Hamka (1979). *Kenang-Kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang,.
- Hamka (1982). *Tafsir al-Azhar*, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, (1982). *Tafsir al-Azhar*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, (2005). *Dari Hati ke Hati, tentang Agama, Sosial dan Politik*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, "Mensyukuri Tafsir al-Azhar", *Panji Masyarakat*, Edisi 317.
- Harun Nasution. (1991). *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: UII Press.
- Howard M. Federspiel. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, Bandung: Mizan.
<http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings/details/4/50>;
- Islah Gusmian. (2003) *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju.
- Islah Gusmian. (2003). *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju,
- M. Atho' Muzdhar. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: IMIS.
- M. Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- M. Quraish Shihab. (1997). *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan,
- M. Quraish Shihab. (2000). *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati.

- Manna' al-Qaththan. (1976). *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Mu'assasah al-Risalah,
- Munawir Sjadzali. (1993). *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed. V, Jakarta: UII Press.
- Nashruddin Baidan (2003). *Tafsir al-Qur'an di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai.
- Nashruddin Baidan, (2002). *Metode Penafsiran al-Qur'an; Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rafael Raga Maran, (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Jakarta: Rajawali.
- Robert Cribb (1984) "Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966", *Asian Survey* 42 (4).
- Rusydi Hamka. (1981). *Pribadi dan Martabat Buya*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Sidi Gazalba. (1976). *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang.
- Slides Sudyarto DS. (1983). "Hamka, Realisme Relegius" dalam *Hamka Di Mata Hati Ummat*, ed. Nasir Tamara, dkk, Jakarta: Sinar Harapan,
- Soeharto (2014) *Agama dalam Pembangunan Nasional, Himpunan Pidato Presiden Soeharto*, Jakarta: Langit Biru.
- Soekarno, *Negara Nasional dan Cita-Cita Islam*, Pidato yang disampaikan di Universitas Islam Indonesia (UII), tanggal 7 Maret 1953
- Syahrial Syarbaini dkk., (2002). *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thameem Ushama. (2000). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an; Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif*, terj. Drs. Hasan Basri, MA dan Drs. Amroeni, M. Agi, Jakarta: Riora Cipta.
- The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Oxford: Macmillan, 1988.
- Tim Penulis, *Buletin Indonesia Investments*, <http://www.indonesia-investments.com>
- Utang Ranuwijaya, *Hadits-Hadits Pada Kitab Tafsir Hamka: Analisis Sanad Pada Ayat-Ayat Hukum Bidang Perkawinan, Disertasi UIN Jakarta*, Jakarta: UIN.
- Yunahar Ilyas, *Cukup Allah sebagai Pelindung: Kisah Hamka di Penjara Sukabumi*, Republika Online, tanggal 26 November 2011.
- Yunan Yusuf. (2003). *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar; Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penamadani.
- Zulkarnaini Abdullah, (2011). *Meretas Jalan Islam; Telaah Masalah Filsafat, Pemikiran Politik dan Dinamika Masyarakat Muslim*, Langsa: STAIN Cot Kala